

Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kabupaten Lamongan

Ibnu Thosin Hidayatul Alim¹, Yusuf Hariyoko², Anggraeny Puspaningtyas³

^{1, 2, 3} Administrasi Negara, Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

thosin88@gmail.com¹, yusufhari@untag-sby.ac.id², anggraenypuspa@untag-sby.ac.id³

ABSTRACT

Road construction is one of the most important things as the main supporter of economic dynamics and activities, both at the center and in the regions. For this reason, the author examines the existence of road infrastructure in Lamongan Regency. The purpose of this study is to determine the extent to which the implementation of road infrastructure development policies in Lamongan Regency can run effectively and efficiently. By using qualitative methods, it means that the data collected comes from direct observation, interviews, and documentation with the type of qualitative descriptive research through observation to describe and know directly related to the implementation of road infrastructure development policies in Lamongan Regency which is the authority and responsibility of the Lamongan Regency government. The results of the study indicate that there are four factors that influence the successful implementation of road infrastructure development policies in Lamongan Regency, namely: communication factors, adequate resources and play an important role in the successful implementation of policies such as human resources, financial resources and equipment resources, disposition of the employees. policy actors and bureaucratic structures.

Keywords: *Development, Infrastructure, Implementation*

ABSTRAK

Pembangunan jalan merupakan salah satu hal yang sangat penting sebagai pendukung utama dinamika dan aktivitas ekonomi baik itu di pusat maupun di daerah. Untuk itu penulis meneliti keberadaan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan dapat berjalan efektif dan efisien. Dengan menggunakan metode kualitatif, maknanya data yang dikumpulkan berasal dari observasi secara langsung, wawancara, dan dokumentasi dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif melalui observasi untuk menggambarkan dan mengetahui secara langsung terkait implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lamongan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat empat faktor yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan, yakni : faktor komunikasi, sumber daya yang memadai dan berperan penting terhadap berhasilnya implementasi kebijakan seperti sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan sumber daya peralatan, disposisi para pelaku kebijakan dan struktur birokrasi.

Kata Kunci : *Pembangunan, Infrastruktur, Implementasi*

Pendahuluan

Menurut (Potres, 1976), Pembangunan sebagai transformasi ekonomi, sosial, dan budaya. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk memperbaiki berbagai aspek kehidupan masyarakat”. Selanjutnya, (Ginanjar Kartasamitra, 1994) menyatakannya sebagai

“suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pada tahun ini terealisasi pembangunan ruas jalan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lamongan, yakni ruas jalan Tikung-Sumberkerep. Sebelumnya ruas jalan Tikung-Sumberkerep belum terjamak upaya pembangunan infrastruktur jalan hampir selama 10 tahun dengan panjang mencapai 5,5 km. Namun masih menjadi tugas berat bagi pemerintah kabupaten dan OPD yang terkait untuk merealisasikan dari sekian kilometer jalan yang masih menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah Kabupaten Lamongan dengan panjang total mencapai 416.116 km dengan beberapa kondisi jalan yang ada. Utamanya pada kondisi jalan yang rusak maupun rusak berat di semua wilayah Kabupaten Lamongan yang belum tersentuh upaya pembangunan infrastruktur yang memadai, utamanya pada daerah rawan bencana. Dari data yang diambil dari Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan menunjukkan klasifikasi pada tingkat kondisi jalan yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah setempat dalam kondisi rusak sepanjang 16,5 km dan rusak berat sepanjang 28,5 km. Sehingga banyaknya masyarakat merasa tidak nyaman dengan situasi jalan dalam keadaan tidak baik di ruas jalan tersebut. Keadaan tersebut tentunya memberikan dampak negatif bagi aktifitas kehidupan masyarakat setempat dengan kondisi jalan yang memprihatinkan utamanya menghambat faktor perekonomian masyarakat yang utamanya menggunakan alat transportasi darat sebagai perpindahan barang maupun jasa.

Untuk itu peneliti kemudian tertarik mengadakan penelitian mengenai implementasi kebijakan (Jamula) Jalan Mantap dan Alus Lamongan dengan mengkaji empat indikator menggunakan Teori Edward III sebagai keberhasilan implementasi kebijakan yaitu faktor komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, maknanya data yang dikumpulkan berasal dari observasi secara langsung, wawancara, dan dokumentasi dengan tipe penelitian deskriptif kualitatif dengan melalui observasi untuk menggambarkan dan mengetahui implementasi kebijakan pemerintah dalam peningkatan atau pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan. Maka peneliti memfokuskan untuk meneliti implementasi dari kebijakan pembangunan infrastruktur jalan yang terdapat di Kabupaten Lamongan melalui Teori Model Edward III (1984:10) dengan mengajukan empat faktor atau variabel yang dapat mempengaruhi proses implementasi kebijakan diantaranya, faktor komunikasi, sumber daya (sumber daya manusia, sumber daya keuangan dan peralatan, serta sumber daya informasi dan kewenangan), disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini dilaksanakan di 2 tempat, yakni di Kantor Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan yang terletak di Jalan Mastrip No. 61, Sukomulyo, Kecamatan Lamongan, Kabupaten Lamongan serta mengamati langsung implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan tepatnya di ruas jalan Tikung-Sumberkerep dengan panjang mencapai 5,5 km.

Pembahasan

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur di Kabupaten Lamongan

Faktor Komunikasi (*Communication*)

Komunikasi sangat berpengaruh terhadap berlangsungnya keberhasilan implementasi kebijakan. Bentuk-bentuk yang diwujudkan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Lamongan terkait komunikasi cukup efektif dengan komunikasi yang dijalankan antara Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan dengan kontraktor sebagai

penyedia jasa berupa adanya koordinasi mengenai kelengkapan dokumen terkait daftar harga satuan timbang dan peralatan utama, terkait rencana keselamatan konstruksi, spesifikasi teknis, gambar-gambar, dan dokumen. Sementara untuk komunikasi dengan masyarakat berupa sosialisasi-sosialisasi maupun penyampaian informasi yang berkaitan dengan proses implementasi kebijakan penguatan pembangunan infrastruktur jalan di ruas jalan Tikung-Sumberkerep melalui beberapa platform media sosial milik Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan. Sehingga masyarakat Lamongan mengerti apa yang menjadi maksud dan tujuan kebijakan Jamula ini. Dengan indikator faktor komunikasi yang bersifat interpersonal antara setiap lini baik itu masyarakat dan LSM serta pihak swasta yang diberi mandat untuk memproyeksikan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan maka implementasi kebijakan Jalan Mantap dan Alus Lamongan sangat efektif dan efisien.

Sumber Daya (*Resources*)

Selain faktor komunikasi sebagai indikator keberhasilan implementasi, implementasi infrastruktur jalan juga ada kaitannya dengan faktor sumber daya seperti sumber daya keuangan, sumber daya manusia dan sumber daya peralatan dengan mengomunikasikan terkait sumber daya, komunikasi antara pelaksana kebijakan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan dengan kontraktor untuk memilih rekanan yang ahli dalam bidangnya sesuai dengan prinsip spesialisasinya, proses pemilihan tersebut disepakati antara Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dengan pihak kontraktor atas nama PT Bima Sakti Adhinata yang disebut penyedia jasa, untuk peralatannya semua dipasrahkan ke pihak kontraktor dengan peralatan-peralatan yang memang dikhususkan untuk pengecoran jalan beton seperti : *meliputi dump truck/truck mixer, bull dozer, mesin roller, dan lainnya.*

Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan sangat percaya pada kontraktor, karena memang PT Bima Sakti Adhinata sudah menangani beberapa jalan di kabupaten Lamongan dengan baik. Sehingga dengan adanya kepercayaan tersebut sangat efektif terkait implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur pada ruas Tikung-Sumberkerep tersebut. Mengenai anggaran yang disepakati antara PPK dengan kontraktor sebesar Rp.12.008.150.000,00 (Dua Belas Milyar Delapan Juta Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah). Kontrak tersebut dibiayai dari APBD melalui Dana Alokasi Khusus dalam bidang jalan tahun anggaran 2021.

Disposisi (*Disposition*)

Indikator disposisi juga berpengaruh dalam implementasi kebijakan Jalan Mantap dan Alus Lamongan ini, pasalnya keinginan dan kemauan yang kuat oleh pihak pelaksana kebijakan yakni Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Lamongan dalam implementasi kebijakan Jamula ini mendorong pihak kontraktor untuk menyelesaikan masa kontrak dengan tepat waktu, masa kontrak tersebut merupakan jangka waktu berlaku kontrak antara PPK dengan penyedia jasa terhitung sejak tanggal penandatanganan kontrak sampai dengan tanggal penyerahan akhir pekerjaan atau disebut Final Hand Over (FHO), selain itu pihak Dinas Pekerjaan Umum dan Bina Marga Kabupaten Lamongan juga mendorong pihak penyedia jasa konstruksi yakni PT. Bima Sakti Adhinata dengan sanksi dan denda jika terjadi hal-hal yang tidak diharapkan selama proses implementasi kebijakan

Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi terkait pelaksanaan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan melalui Bupati Lamongan sebagai pembuat kebijakan kemudian dilaksanakan untuk diteruskan dan dilaksanakan sebagai pelaksana kebijakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan untuk diteruskan kembali kedalam bentuk struktur birokrasi yang berwenang khusus dalam pelaksanaan penguatan infrastruktur jalan

yakni bidang pengelolaan jalan dengan dikerjakan oleh seksi pembangunan dan peningkatan jalan sebagai struktur birokrasi khusus yang menangani pembangunan jalan, kemudian hasil pekerjaan yang dilaksanakan sesuai dengan kontrak penyedia jasa yakni PT. Bima Sakti Adhinata yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Sebelumnya dalam penyusunan rencana umum perbaikan jalan kabupaten maupun penyusunan RK Dana Alokasi Khusus Tahun Anggaran 2021 yang diimplementasikan oleh Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan berkoordinasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Lamongan.

Sedangkan mengenai seluruh keluhan, pengaduan dan laporan mengenai kerusakan akibat kelalaian dalam implementasi penguatan infrastruktur jalan yang dikerjakan oleh pihak kontraktor atas wewenang yang diberikan oleh kuasa pengguna anggaran selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga Kabupaten Lamongan bekerja sama kepada masyarakat, wartawan dan LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat).

Implementasi kebijakan “Jalan Mantab dan Alus” (Jamula) di Kabupaten Lamongan sudah cukup berhasil dalam pengimplementasian kebijakan melalui beberapa indikator yang berpengaruh terhadap pelaksanaannya. Dan kesesuaian dengan konstruksinya yang berbasis beton dapat menjadi penguatan infrastruktur yang memadai di kabupaten Lamongan agar dapat bertahan dalam kurun waktu yang lama, serta pemanfaatan akses jalan tersebut dapat dirasakan oleh masyarakat yang melintasi ruas jalan Tikung-Sumberkerep tersebut.

Penutup

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah dipaparkan dan dijelaskan pada bab sebelumnya, maka peneliti dapat menyimpulkan sebagai berikut:

Indikator faktor komunikasi dalam implementasi kebijakan pembangunan jalan sudah berjalan optimal dengan adanya sosialisasi kebijakan menjadi kunci suatu komunikasi yang disampaikan selain kepada pelaksana kebijakan juga kepada kelompok sasaran kebijakan, yakni utamanya masyarakat Lamongan. Indikator faktor sumber daya yang meliputi sumber daya manusia, sumber daya keuangan (anggaran) dan sumber daya peralatan bisa dikatakan berjalan secara optimal dan akuntabilitas. Ketiga unsur dari sumber daya sangat berkaitan dan bergantung satu sama lain. Indikator faktor disposisi dalam pelaksanaan implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan sudah cukup berhasil dengan kemauan yang kuat oleh para pelaksana kebijakan untuk mendorong kebijakan tersebut merata di semua ruas yang masih menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Lamongan, serta dampak dari pembangunan infrastruktur dapat dirasakan oleh masyarakat Lamongan untuk mewujudkan infrastruktur jalan yang memadai. Sementara itu, indikator struktur birokrasi faktor struktur birokrasi berjalan dengan baik terkait implementasi kebijakan infrastruktur tersebut. Hal-hal yang meliputi aspek struktur organisasi, pembagian dan pelimpahan kewenangan, dan hubungan intra dan ekstra organisasi dalam pelaksanaan kebijakan, Dalam hal ini yang terlibat adalah Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan dengan kontraktor/penyedia jasa.

Saran

Saran yang dapat diberikan terhadap proses implementasi kebijakan pembangunan infrastruktur jalan di Kabupaten Lamongan adalah : **(1)** Diharapkan pada pelaksana kebijakan Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan tidak cepat puas dengan keberhasilan implementasi jalan pada ruas jalan Tikung-Sumberkerep yang panjangnya mencapai 5,5 km, sebab masih banyaknya ruas jalan yang menjadi prioritas pembangunan pada tahun 2022 dan masih menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Lamongan, utamanya

pada wilayah rawan bencana seperti luapan banjir yang dapat menyebabkan rusaknya jalan dengan skala rusak parah agar menjadi perhatian dari pemerintah daerah dengan memanfaatkan beberapa alokasi dana yang tersedia. **(2)** Diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten Lamongan dan OPD yang terkait seperti Dinas PU Bina Marga Kabupaten Lamongan untuk membatasi tonase kendaraan bermuatan yang melintas di jalan lokal di Kabupaten Lamongan. **(3)** Kepada Dinas Pekerjaan Umum sebagai pelaksana kebijakan agar terus melakukan evaluasi kebijakan dan kinerja dalam rangka pengawasan serta harus dapat memberikan informasi objektif mengenai tingkat capaian pelaksana kebijakan pada momentum atau dalam jangka waktu tertentu. Dengan kata lain, untuk melihat apakah proses pelaksanaan kebijakan telah dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis (SOP)/pelaksanaan jalan yang telah ditentukan yang berpengaruh terhadap usia fisik ruas jalan Tikung-Sumberkerep tersebut.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2021). *Kabupaten Lamongan Dalam Angka 2021*. Lamongan: BPS Publisir
- Dunn, W.N. (1994). *Public Policy Analysis: An Introduction*. Prentice Hall International Englewood
- Hardani, Ustiauwaty, J. A. H. (2017). *Buku Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* (Issue April).
- Kurniawan, W., & Maani, K. D. (2020). Implementasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Jalan Di Kecamatan Tabir Selatan Kabupaten Merangin Dengan Menggunakan Model Donald Van Metter Dan Carl Van Horn. *Jurnal Mahasiwa Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 2(2), 70–79.
- Mustari, Nuryanti.(2015). *Pemahaman Kebijakan Publik (Formulasi, Implementasi dan Evaluasi Kebijakan Publik)*. Yogyakarta: PT Leutika Nouvalitera.
- Republik Indonesia. (2018). Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- Republik Indonesia. (2020). Undang-undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- Republik Indonesia. (2004). Undang-undang No. 38 Tahun 2004 tentang Jalan
- Setyawan, Dody. (2017). *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Inteligensia Media.
- Subarsono, A. (2005). *Analisis Kebijakan Publik. Konsep, Teori dan Aplikasi*. Pustaka Pelajar Jakarta
- Tjokroadmidjojo, Bintoro. (1982). *Teori Strategi Pembangunan Nasional*. Jakarta: PT Gunung Agung.
- Wahab, S. (2016). *Analisis Kebijakan. Dari Formulasi ke Penyusunan Model-model Implementasi Kebijakan Publik*. Bumi Aksara Jakarta
- Widodo, Joko. (2018). *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Media Nusa Creative.